



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
NOMOR 1/PPID-DJPK/V/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 390);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96;
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN

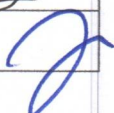
Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan ini.

KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN,

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Ketua Tim Kerja Humas	
2.	Ketua Tim Kerja Hukum	


MIFTAHUL HUDA



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditiempk@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
NOMOR 1/PPID-DJPK/V/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 390);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan ini.

KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN,



MIFTAHUL HUDA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 NOMOR 1/PPID-KKP/IX/2026
 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 TAHUN 2026

No	Daftar Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
						Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Cetak	Rekan	Online	
1.	Profil	Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Ditjen PK serta kantor unit-unit di bawahnya;	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
		Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
		laporan harta kekayaan pejabat negara yang telah diperiksa,	Sekretariat Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip

No	Daftar Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
						Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Cetak	Rekan	Online	
		iverifikasi, dan telah dikirimkan oleh KPK untuk diumumkan.	Pengelolaan Kelautan									
2.	Ringkasan informasi tentang kinerja Ditjen PK	uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
3.	Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi publik Ditjen PK	a. tata cara memperoleh Informasi Publik; Dan b. tata cara pengajuan keberatan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
4.	Informasi tentang kepegawaian Ditjen PK	a. jumlah pegawai; dan b. sebaran pegawai.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
5.	Informasi tentang keuangan Ditjen PK 2025	DIPA 2025	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
		Ringkasan RKA K/L 2025	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip

No	Daftar Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Sa tker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan/ penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuat an	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
						Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Cetak	Rekan	Online	
6.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawataan,	a. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; b. profil lengkap pimpinan; c. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Ditjen PK.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
7.	Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya Ditjen PK	Dokumen perjanjian kerja sama (PKS)	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
8.	SOP perizinan dan rekapitulasi daftar penerbitan izin lingkungan Ditjen PK	SOP perizinan dan rekapitulasi daftar penerbitan izin lingkungan Ditjen PK	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
9.	Rencana Strategis Ditjen PK	Dokumen Renstra Ditjen PK 2025 - 2029	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
10.	Rencana Kerja Ditjen PK	Dokumen Renja Ditjen PK 2025	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip

No	Daftar Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Sa tker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan/ penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuata n	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
						Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Cetak	Rekan	Online	
11.	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik Ditjen PK	Rekapitulasi matriks tindak lanjut permohonan informasi per triwulan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
12.	Informasi tentang standar pengumuman Informasi Ditjen PK	Informasi tentang standar pengumuman Informasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
13.	Data profil kawasan konservasi	Informasi terkait luasan, zonasi, dan batas koordinat kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.	Direktorat Konservasi Ekosistem dan UPR Kawasan Konservasi Perairan Nasional	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
14.	Data rekapitulasi luasan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan	Informasi rekapitulasi luasan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui infografis	Direktorat Konservasi Ekosistem	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
15.	Peta sebaran zonasi kawasan konservasi	Peta sebaran zonasi kawasan konservasi	Direktorat Konservasi Ekosistem	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip

No	Daftar Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Sa taker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan/ penyerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuata n	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
						Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Cetak	Rekan	Online	
16.	SK Penetapan Kawasan konservasi	SK Penetapan Kawasan konservasi	Direktorat konservasi Ekosistem	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
17.	SK Rencana Pengelolaan Kawasan konservasi	SK Rencana Pengelolaan Kawasan konservasi	Direktorat konservasi Ekosistem	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
18.	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan konservasi	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan konservasi	Direktorat konservasi Ekosistem	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
19.	Juknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan konservasi	Juknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan konservasi	Direktorat konservasi Ekosistem	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
20.	Juknis Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak konservasi (KOMPAK)	Juknis Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak konservasi (KOMPAK)	Direktorat konservasi Ekosistem	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
21.	Daftar kelompok Masyarakat Penggerak konservasi (KOMPAK)	Daftar Kelompok Masyarakat Penggerak konservasi (KOMPAK)	Direktorat konservasi Ekosistem	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
22.	Neraca Sumber Daya Laut di Kawasan konservasi	Neraca Sumber Daya Laut di Kawasan konservasi	Direktorat konservasi Ekosistem	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip

No	Daftar Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Sa tker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan/ penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuat an	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
						Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Cetak	Rekan	Online	
23.	Data hasil monitoring biofisik (karang, mangrove, dan lamun) dan jenis ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah di kawasan konservasi nasional	Informasi hasil monitoring biofisik (karang, mangrove, dan lamun) di kawasan konservasi nasional	Direktorat Konservasi Ekosistem dan UPT Kawasan Konservasi Perairan Nasional	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
24.	Informasi tentang kerusakan karang	Informasi tentang kerusakan karang	Direktorat Konservasi Ekosistem	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
25.	Informasi coral stock center	Informasi coral stock center	Direktorat Konservasi Ekosistem	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
26.	SIDAKO (Sistem Database Konservasi)	SIDAKO (Sistem Database Konservasi)	Direktorat Konservasi Ekosistem	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
27.	Juknis Penerbitan SAJI DN	Juknis Penerbitan SAJI DN	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
28.	Juknis Penerbitan SAJI LN	Juknis Penerbitan SAJI LN	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
29.	Juknis Pemeriksaan Stok	Juknis Pemeriksaan Stok	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip

No	Daftar Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
						Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Cetak	Rekan	Online	
30.	Juknis Kuota Ekspor	Juknis Kuota Ekspor	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
31.	Kuota Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES	Kuota Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
32.	Data total jumlah, jenis, dan berat ikan yang telah diperdagangkan melalui SAJI dan Rekomendasi	Data total jumlah, jenis, dan berat ikan yang telah diperdagangkan melalui SAJI dan Rekomendasi per UPT lingkup Ditjen PK	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
33.	Data daerah tujuan pengiriman produk ikan melalui SAJI dan Rekomendasi	Data daerah tujuan pengiriman produk ikan melalui SAJI dan Rekomendasi per UPT lingkup Ditjen PK	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
34.	Jumlah Kuota Pengambilan/ Penangkapan Nasional	Jumlah Kuota Pengambilan/ Penangkapan Nasional	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
35.	Jumlah Kuota Pengambilan/ Penangkapan Terealisasi	Jumlah Kuota Pengambilan/ Penangkapan Terealisasi per UPT lingkup Ditjen PK	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip

No	Daftar Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
						Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Cetak	Rekan	Online	
36.	Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Jenis Ikan	Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Jenis Ikan yang telah ditetapkan oleh KKP	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
37.	Juknis Pendataan Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES	Juknis Pendataan Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
38.	Juknis Restocking dan Rehabilitasi Habitat yang Dilindungi dan Appendiks CITES	Juknis Restocking dan Rehabilitasi Habitat yang Dilindungi dan Appendiks CITES	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
39.	Juknis Penanganan Kejadian Terdampar dan Hasil Tangkapan Sampungan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES	Juknis Penanganan Kejadian Terdampar dan Hasil Tangkapan Sampungan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
40.	Juknis Penilaian Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi	Juknis Penilaian Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
41.	Status Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi	Status Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip

No	Daftar Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Sa- tker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan/ penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuata n	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
						Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Cetak	Rekan	Online	
42.	Juknis Tentang Lokasi dan Tata Cara Pelepaslaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Alam	Juknis Tentang Lokasi dan Tata Cara Pelepaslaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Alam	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
43.	Juknis Pengembangan Ikan Dilindungi dan Apendiks CITES	Juknis Pengembangan Ikan Dilindungi dan Apendiks CITES	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
44.	Daftar jenis ikan yang dilindungi	Informasi daftar jenis ikan yang dilindungi	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
45.	SK Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan	SK Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
46.	Data hasil monitoring/ pendataan biota perairan yang dilindungi, appendiks CITES, dan/atau terancam punah	Informasi hasil monitoring jenis ikan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
47.	Informasi restocking dan pelepaslaran biota perairan	Data dan informasi kegiatan restocking dan pelepaslaran biota perairan dilindungi	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip

No	Daftar Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
						Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Cetak	Rekan	Online	
		dan appendiks CITES										
48.	SOP Penerbitan Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Mekanisme Hak Akses Turunan	SOP Penerbitan Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Mekanisme Hak Akses Turunan	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
49.	SOP Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN)	SOP Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN)	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
50.	Juknis Penetapan Kuota Pengambilan	Juknis Penetapan Kuota Pengambilan	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
51.	Juknis Penerbitan SIPJI	Juknis Penerbitan SIPJI	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
52.	Data jumlah SIPJI, SAJI, dan Rekomendasi yang sudah terbit	Data jumlah SIPJI, SAJI, dan Rekomendasi yang sudah terbit per UPT lingkup Ditjen PRL	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
53.	Non-detriment findings (NDF) jenis	Dokumen Non-detriment findings	Direktorat Konservasi	Direktur Jenderal	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip

No	Daftar Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Sa tker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan/ penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuata n	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
						Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Cetak	Rekan	Online	
	ikan appendiks CITES	(NDF) jenis ikan appendiks CITES	Spesies dan Genetik	Pengelolaan Kelautan								
54.	Juknis dan SPD Informasi Geospasial Tematik (IGT) Biota Perairan Dilindungi	Juknis dan SPD Informasi Geospasial Tematik (IGT) Biota Perairan Dilindungi	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
55.	Informasi Geospasial Tematik (IGT) Biota Perairan Dilindungi	Peta sebaran kemunculan, keterdamparan, keterancaman, habitat penting, dan migrasi biota perairan dilindungi dan appendiks CITES	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
56.	Informasi penanganan konflik biota perairan	Informasi penanganan konflik biota dengan manusia	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
57.	SOP pengelolaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Prosedur pengelolaan MHA	Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√				√	5 tahun setelah menjadi arsip
58.	Data penanaman Mangrove	Informasi lokasi dan kelompok penerima bantuan	Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
59.	Data bantuan ekonomi produktif	Informasi lokasi dan kelompok penerima bantuan	Direktorat Pesisir dan	Direktur Jenderal	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip

No	Daftar Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
						Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Cetak	Rekan	Online	
60.	Juknis Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif	Tata cara pemberian Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif	Pulau-pulau Kecil Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pengelolaan Kelautan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		✓		Soft Copy		✓	5 tahun setelah menjadi arsip
61.	Data lokasi sertifikasi HAT	Informasi lokasi sertifikasi HAT	Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		✓		Soft Copy		✓	5 tahun setelah menjadi arsip
62.	Data lokasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang sudah terbit	Informasi lokasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang sudah terbit	Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		✓		Soft Copy		✓	5 tahun setelah menjadi arsip
63.	Juknis Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif	Juknis Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif	Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		✓		Soft Copy		✓	5 tahun setelah menjadi arsip
64.	Informasi tumpahan minyak	Informasi mengenai pengertian, dampak, regulasi hingga penanganan tumpahan minyak	Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		✓		Soft Copy		✓	5 tahun setelah menjadi arsip
65.	Juknis Pencegahan Pencemaran, Penanggulangan, dan Rehabilitasi Tumpahan Minyak di Kawasan Pesisir	Juknis Pencegahan Pencemaran, Penanggulangan, dan Rehabilitasi Tumpahan Minyak	Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		✓		Soft Copy		✓	5 tahun setelah menjadi arsip

No	Daftar Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
						Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Cetak	Rekan	Online	
	dan Pulau-Pulau Kecil	di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
66.	Data Produksi Garam	Informasi Jumlah Produksi Garam	Direktorat Sumber Daya Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
67.	Data Pengembangan Usaha Garam Rakyat	Informasi Lokasi, Jenis Bantuan, dan Penerima Bantuan	Direktorat Sumber Daya Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
68.	Lokasi gudang garam rakyat	Informasi lokasi gudang garam rakyat	Direktorat Sumber Daya Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
69.	Lokasi Gudang Garam nasional	Informasi lokasi gudang garam nasional	Direktorat Sumber Daya Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
70.	Data lokasi BMKT yang dikelola untuk wisata bahari	Informasi lokasi yang sudah diajukan survey dan Pengangkatan	Direktorat Sumber Daya Kelautan	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.	√			Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
71.	Data lokasi dan profil desa wisata bahari	Data lokasi dan profil desa wisata bahari	Direktorat Jasa Bahari	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
72.	Tata cara Perizinan berusaha wisata bahari	Tata cara perizinan berusaha wisata bahari	Direktorat Jasa Bahari	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip

No	Daftar Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
						Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Cetak	Rekan	Online	
73.	Tata cara persetujuan wisata memancing (e-mancing)	Tata cara persetujuan wisata memancing (e-mancing)	Direktorat Jasa Bahari	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip
74.	Juknis Bantuan Desa Wisata Bahari	Aturan berupa Permen/Kepmen/Kepdirjen terkait Desa Wisata Bahari, MKT, PNB	Direktorat Jasa Bahari	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Tahun 2025, Jakarta.		√		Soft Copy		√	5 tahun setelah menjadi arsip

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN,


MIFTAHO L HUDA